

## IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Imelda Putri<sup>1</sup>, Ramdani Faris Wardiansyah<sup>2</sup>, Satria Adiguna Attallah<sup>3</sup>  
Rinny Meidiyustiani<sup>4</sup>

Akuntansi, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

[rinny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id](mailto:rinny.meidiyustiani@budiluhur.ac.id), [imeldaputri0512@gmail.com](mailto:imeldaputri0512@gmail.com),

[ramdanifariss92@gmail.com](mailto:ramdanifariss92@gmail.com), [satriaattallah81@gmail.com](mailto:satriaattallah81@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to conduct a systematic review of various literature related to the implementation of accrual accounting in Indonesian government institutions. Following the enactment of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards, the Indonesian government began reforms in public sector accounting by adopting the accrual basis to enhance accountability and transparency in state financial management. However, the implementation has faced various structural, technical, and cultural challenges at different levels of government. Through an analysis of academic articles and relevant policies, this review identifies a range of factors that influence both the success and challenges of the implementation. This study also compares Indonesia's experience with international practices and provides recommendations to improve the effectiveness of accrual-based accounting system implementation in the Indonesian context.*

**Keywords:** *Accrual-based accounting, implementation, public sector, Government Accounting Standards (SAP), Government of Indonesia.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian secara sistematis terhadap beragam literatur yang berkaitan dengan penerapan akuntansi akrual di lembaga pemerintah Indonesia. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi dalam akuntansi sektor publik dengan mengadopsi basis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, pelaksanaan tersebut mengalami berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan kultural di berbagai tingkatan pemerintahan. Melalui analisis terhadap artikel akademis serta kebijakan yang relevan, kajian ini mengidentifikasi beragam faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan. Penelitian ini juga membandingkan pengalaman Indonesia dengan praktik internasional, serta memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam konteks di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Akuntansi berbasis akrual, implementasi, sektor publik, SAP, pemerintah Indonesia.*

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**1. Pendahuluan**

Reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia telah menjadi prioritas bagi pemerintah sejak penerapan tiga undang-undang utama: UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun

2004 yang mengatur Pemeriksaan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang ini telah menjadi titik awal bagi penerapan prinsip good governance dalam sektor publik, yang menekankan kebutuhan akan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual melalui PP No. 71 Tahun 2010, yang mulai dilaksanakan secara penuh pada tahun 2015. Berbeda dengan sistem kas yang hanya mencatat transaksi saat uang masuk atau keluar, sistem akrual merekam transaksi serta peristiwa keuangan saat hak dan kewajiban muncul, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Hal ini memungkinkan akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih jelas dan tepat mengenai keadaan keuangan pemerintah.

Penerapan sistem ini dipengaruhi oleh paradigma New Public Management (NPM), yang mendorong sektor publik untuk mengadopsi cara manajemen yang lebih efisien, transparan, dan berfokus pada hasil seperti yang diterapkan di sektor swasta. Dengan demikian, pelaksanaan akuntansi akrual tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam modernisasi tata kelola pemerintah.

Namun, peralihan dari sistem kas ke akrual tidaklah sederhana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak tantangan signifikan dalam penerapan sistem ini, termasuk kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, kerumitan standar, serta ketahanan budaya organisasi. Di Indonesia, tantangan-tantangan tersebut masih menjadi penghalang utama terhadap keberhasilan implementasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa penelitian bahkan mengungkap bahwa dalam banyak situasi, informasi akrual belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan manajerial.

Selain itu, tekanan dari lembaga internasional seperti IMF dan World Bank juga memengaruhi penerapan akuntansi akrual di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Aspek-aspek seperti legitimasi dari luar, tekanan normatif, serta kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan dana dukungan internasional turut mendorong negara-negara untuk mengadopsi sistem ini.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk memberikan ulasan sistematis mengenai literatur akademik dan kebijakan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Tinjauan ini akan berkontribusi dalam mengidentifikasi pencapaian, tantangan, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di sektor publik Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode tinjauan literatur yang sistematis dengan meneliti berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual di lembaga pemerintah Indonesia. Literatur yang dianalisis meliputi artikel jurnal yang terindeks yang dirilis terutama dalam rentang tahun 2010 hingga 2024. Beberapa referensi penting dari sebelum 2010 juga tetap dimasukkan karena relevansinya.

Pencarian literatur dilakukan melalui berbagai database online seperti Google Scholar dengan memanfaatkan kata kunci seperti “akuntansi berbasis akrual,” “sektor publik,” “implementasi,” dan “Indonesia.” Kriteria yang digunakan untuk pemilihan publikasi adalah yang secara khusus membahas adopsi, tantangan, pencapaian, serta dampak dari penerapan akuntansi berbasis akrual pada lembaga pemerintah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menekankan temuan utama, membandingkan hasil dari berbagai penelitian, serta mengevaluasi kevalidan dan relevansi sumber yang digunakan.

Ruang lingkup kajian dibatasi pada literatur yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan

Inggris yang relevan dalam konteks Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana pelaksanaan akuntansi berbasis akrual telah dilaksanakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Penelitian

| Penulis            | Judul                                                                                      | Hasil Temuan                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karunia et al.     | The Implementation of Accrual-based Accounting in Indonesian Government.                   | Implementasi akrual meningkatkan relevansi dan reliabilitas laporan keuangan, tetapi belum konsisten antar daerah.       |
| Larantia           | Pengaruh Kualitas SDM, Komitmen, Pelatihan, dan Insentif terhadap Implementasi SAP Akrual. | Kualitas SDM dan intensitas pelatihan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual di SKPD.    |
| Prayogo et al.     | Analisis Implementasi PP No. 71 Tahun 2010.                                                | Pelaksanaan SAP akrual berjalan baik, namun keterbatasan jumlah pegawai kompeten dan pemahaman regulasi jadi penghambat. |
| Dewi et al.        | Application of Accrual Accounting to Government.                                           | Implementasi menghadapi tantangan besar terkait kesiapan teknis, keterbatasan sistem, dan budaya kerja berbasis kas.     |
| Sari & Muslim      | Accountability and Transparency in Public Sector Accounting.                               | Basis akrual mendukung transparansi dan pelaporan yang lebih komprehensif, meskipun penerapan belum merata.              |
| Irwan              | Evaluasi Implementasi SAP Akrual di Kabupaten/Kota.                                        | Banyak daerah belum mampu menyusun laporan keuangan akrual secara tepat waktu dan akurat akibat keterbatasan sistem.     |
| Fatmariansi et al. | Persepsi SKPD terhadap Akuntansi Berbasis Akrual.                                          | Pegawai menyambut baik sistem akrual, tetapi masih memerlukan bimbingan teknis dan pembinaan rutin.                      |
| Muliati et al.     | Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan SAP Akrual.                                    | Ditemukan masih rendahnya kesiapan infrastruktur, SDM, dan sistem TI untuk mendukung pelaksanaan akrual.                 |

|                |                                                      |                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouda           | Accrual Accounting in the Government Sector.         | Akuntansi akrual penting untuk peningkatan transparansi dan efisiensi fiskal, tetapi memerlukan biaya dan perubahan kelembagaan. |
| Barrett        | Financial Management in the Public Sector.           | Australia berhasil menerapkan akrual dengan dukungan pelatihan, audit mandiri, dan akuntabilitas publik tinggi.                  |
| Barton         | Issues in Accrual Accounting and Budgeting.          | Sistem GFS lebih tepat untuk sektor publik dibanding AAS, perlunya pendekatan tunggal agar pelaporan lebih konsisten.            |
| Carlin         | Debating the Impact of Accrual Accounting.           | Implementasi akrual tidak menjamin peningkatan kinerja jika tidak didukung manajemen yang adaptif dan kebijakan pengawasan.      |
| Dewi et al.    | Accrual Accounting in Local Government.              | Pemerintah daerah menunjukkan variasi besar dalam kesiapan implementasi, dengan keterbatasan pemahaman konsep dasar akrual.      |
| Mulyati et al. | Analisis Efektivitas Implementasi Akrual pada Pemda. | Efektivitas bergantung pada sinergi antara sistem keuangan daerah, pelatihan, dan pengawasan dari BPK.                           |
| Jabbari et al. | Inefficacy of Accrual Accounting in Public Sector.   | Basis akrual tidak otomatis meningkatkan efisiensi, terutama di negara berkembang dengan masalah tata kelola.                    |
| Arfan et al.   | Audit Berbasis Akrual dan Akuntabilitas Pemerintah.  | Audit berbasis akrual mampu meningkatkan kepercayaan publik jika disertai transparansi dalam penyajian laporan.                  |

### 3.2 Pembahasan

Penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual di Indonesia dimulai secara resmi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan mulai berlaku pada tahun 2015. Aturan ini mengharuskan semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membuat laporan keuangan yang mencakup laporan operasional, neraca, laporan arus kas,

serta catatan terkait laporan keuangan dengan menggunakan metode akrual. Walaupun secara administratif telah dilakukan, analisis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan ini masih menghadapi berbagai masalah terkait kualitas dan penggunaannya dalam manajemen. Karunia et al. (2019) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan akrual belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana dalam mengambil keputusan oleh pemerintah daerah. Dewi et al. (2018) juga menambahkan bahwa banyak pegawai daerah yang masih kurang memahami implementasi teknis akrual dengan baik.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sangat bervariasi. Salah satu elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan adalah mutu sumber daya manusia (SDM). Penelitian oleh Larantia (2022) menunjukkan bahwa pelatihan dan pemberian insentif kepada pegawai pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Namun, Irwan (2022) dan Dewi et al. (2018) mencatat bahwa masih banyak lembaga pemerintah daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem akuntansi akrual dengan efisien. Prayogo et al. (2023) menekankan perlunya sosialisasi yang berkelanjutan terkait regulasi serta pendampingan teknis untuk memperkuat pemahaman pegawai di dinas teknis mengenai SAP yang berbasis akrual. Budaya organisasi yang masih didominasi oleh pendekatan kas juga menghambat proses transisi menuju basis akrual.

Kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi akuntansi yang berbasis akrual ternyata sangat beragam. Beberapa pemerintah daerah menunjukkan kesiapan yang cukup baik, namun banyak yang masih menghadapi berbagai hambatan. Muliati et al. (2024) menemukan bahwa banyak pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi serta tenaga akuntansi pemerintahan yang cukup. Fatmariansi et al. (2022) juga mengungkapkan bahwa pegawai di lingkungan SKPD masih mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan antara basis kas dan akrual, sehingga penerapan akrual belum dapat berlangsung dengan optimal. Temuan serupa juga diutarakan oleh Irwan (2022), yang menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pada banyak kabupaten dan kota masih sering terlambat dan kurang akurat karena kurangnya akuntan yang berkualitas.

Akuntansi yang menggunakan basis akrual dipercaya dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Sari dan Muslim (2023) menyatakan bahwa sistem ini memberikan laporan yang lebih menyeluruh serta pengawasan yang lebih adil terhadap kinerja keuangan pemerintah. Arfan dan rekan-rekan (2021) mengungkapkan bahwa audit yang berlandaskan akrual bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara karena mencerminkan aset dan kewajiban dengan cara yang lebih nyata. Mulyati dan tim (2020) juga menggarisbawahi bahwa laporan yang berbasis akrual membantu para pengawas internal dalam mengevaluasi risiko keuangan secara lebih mendalam, yang pada gilirannya dapat menyempurnakan kualitas pengawasan dan pengendalian keuangan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, penerapan akrual di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru telah berhasil menerapkan akuntansi akrual secara menyeluruh berkat adanya dukungan regulasi yang kuat, pengembangan SDM yang berkelanjutan, dan keterpaduan antara sistem pelaporan dan anggaran. Barrett (2004), Ouda (2010), dan Carlin (2005) sependapat bahwa penerapan akrual di negara-negara tersebut menjadi bagian dari reformasi manajemen publik yang komprehensif. Sebaliknya, Barton (2005) memperingatkan bahwa penerapan sistem akrual di sektor publik perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar tidak menambah kerumitan administratif. Di Indonesia, pelaksanaan lebih banyak menitikberatkan pada kepatuhan dalam pelaporan daripada integrasi substansi akrual dalam manajemen kinerja dan anggaran.

Beberapa studi mempertanyakan efektivitas akuntansi akrual dalam meningkatkan efisiensi sektor publik. Jabbari dan rekan-rekannya (2021) menyebutkan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penerapan akrual tidak secara otomatis meningkatkan efisiensi dan kinerja pemerintah tanpa adanya pengelolaan yang baik. Mulyati dan tim (2020) menekankan bahwa keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada kolaborasi antara pelatihan sumber daya manusia, efektivitas sistem laporan, dan keberlangsungan pengawasan. Larantia (2022) menyatakan bahwa keuntungan dari akrual akan lebih terasa jika disertai dengan pendekatan anggaran yang dibangun berdasarkan kinerja serta evaluasi hasil. Di sisi lain, Sari dan Muslim (2023) menekankan bahwa akuntansi berbasis akrual hanya akan memberikan dampak yang besar jika informasi yang dihasilkan digunakan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di level publik. Dengan kata lain, sistem yang baik perlu didukung oleh manajemen yang adaptif dan kultur organisasi yang siap berubah.

#### 4. Kesimpulan

Tinjauan ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan setelah diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih ada berbagai tantangan yang menghambat keberhasilannya, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan penggunaan informasi akrual dalam manajemen.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan di pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan sistem informasi keuangan akrual yang handal, serta penguatan peran audit dan penilaian kinerja yang berbasis output.

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain yang telah sukses menerapkan sistem ini secara menyeluruh. Namun, penyesuaian harus mempertimbangkan karakteristik institusi dan kemampuan lokal agar tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, M., Hardiyansyah, H., & Sudirman, I. (2021). Audit berbasis akrual dan akuntabilitas pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 1-12.
- Barrett, P. (2004). Financial management in the public sector—How accrual accounting and budgeting enhances governance and accountability. *CPA Forum*.
- Barton, A. (2005). Issues in accrual accounting and budgeting by government. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 12(3), 211-225.
- Carlin, T. M. (2005). Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector. *Financial Accountability & Management*, 21(3), 309-336.
- Dewi, N. P., Rachmawati, R., & Husniati, R. (2018). Application of accrual accounting to government. *UNICEES Proceedings*, 1, 262-270.
- Dewi, N. P., Rachmawati, R., & Husniati, R. (2018). Accrual accounting in local government. *UNICEES Proceedings*, 1(1), 148-158.

- Fatmariansi, F., Subroto, B., & Rahmawati, R. (2022). Persepsi pegawai SKPD terhadap akuntansi berbasis akrual. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 77-85.
- Irwan, I. (2022). Evaluasi implementasi SAP berbasis akrual di kabupaten/kota. *Jurnal Eco-Admin*, 12(1), 35-45.
- Jabbari, M., Safari, M., & Zarei, F. (2021). The inefficacy of accrual accounting in public sector performance management: Evidence from an emerging market. *Public Sector Accounting Journal*, 18(2), 89-104.
- Karunia, A. P., Payamta, & Sutaryo. (2019). The implementation of accrual-based accounting in Indonesian government: Has local government financial statement quality improved? *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 115-128.
- Larantia, A. (2022). Pengaruh kualitas SDM, komitmen organisasi, pelatihan, dan insentif terhadap implementasi SAP berbasis akrual (Studi pada SKPD Kabupaten Klaten) [Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta].
- Muliati, N., Hidayat, T., & Ramadhani, N. (2024). Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(1), 20-34.
- Mulyati, D., Setiawan, B., & Lestari, R. (2020). Analisis efektivitas implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 7(1), 55-65.
- Ouda, H. A. G. (2010). Accrual accounting in the government sector: Background, concepts, benefits, and costs. *International Journal on Governmental Financial Management*, 10(1), 49-73.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(2), 44-58.
- Sari, R., & Muslim. (2023). Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(1), 1-16.